

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Chandra, S. Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah. (Jakarta: PT Grasindo, 2005).
- Chomzah, Ali Achmad. Hukum Agraria (Pertanahan di Indonesia). (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2019).
- Eddy, Richard. Aspek Legal Properti – Teori, Contoh, dan Aplikasi. (Yogyakarta: Andi Offset, 2010).
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Hamidi, Jazim. Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Adminitrasi Indonesia. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- Handoko, Widhi. Kebijakan Hukum Pertanahan sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif. (Yogyakarta: Thafa Media, 2014).
- Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia. (Jakarta: Djambatan, 2007).
- Ishaq. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Kementrian ATR/KBPN. Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. (Jakarta, 26 Januari 2022).
- Marbun, S.F. Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara. (Yogyakarta: UII Pressm 2001).

- Martokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. (Yogyakarta: Liberty, 2007).
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum (edisi revisi). (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum Cet. III. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Mulyadi, Kartini dan Gunawan Wijaya. Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah. (Jakarta: Raja Grafindo, 2004).
- Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Ilmu Hukum. (Bandung: Mandar Maju, 2008).
- Pratiwi, Cekli Setya, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, dan Christina Yulita Purbawati. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. (Jakarta: LeIP, 2016).
- R, Ridwan H. Hukum Administrasi Negara. (Yogyakarta: UII Press, 2003).
- Sangsun, Florianus SP. Tata Cara Mengurus Sertipikat Tanah. (Yogyakarta: Gaja Mada Press, 2007).
- Santoso, Urip. Pejabat Pembuat Akta Tanah: Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta. (Jakarta: Prenada Media, 2017).
- Sarosa, Samiaji. Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif. (Jakarta: PT Indeks, 2012).
- Sembiring, Jimmy Joses. Pandangan Mengurus Sertifikat Tanah. (Jakarta: Visimedia, 2010).
- Simanjutak, Enrico. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Transofrmasi dan Refleksi. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

Soekanto, Soerjono dan Mamudji. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986).

Sudjito. PRONA Pensertipikatan tanah secara masal dan Penyelesaian Sengketa Tanah yang Bersifat Strategis. (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1987).

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif. (Bandung: Alfabeta, 2019).

Sumarja, F.X. Hukum Pendaftaran Tanah. (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2010).

Tehupeiory, Aartje. Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia. (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012).

Utsman, Sabian. Metodelogi Penelitian Hukum Progesif. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

B. JURNAL

Admi, Dita Fisdian Admi, Syaprianto, dan Sylvina Rusadi. Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan. Jurnal Moderat. Vol. 7 No. 2. Edisi 2021.

Ardani, Mira Novana. Peran Kantor Pertanahan dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Jurnal Gema Keadilan. Vol. 6 No. 1. Edisi 2019.

_____. Tantangan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum. Jurnal Gema Keadilan. Vol. 6 No. 3. Edisi 2019.

- Aulia, Rizky. Kewenangan Badan Pertanahan Nasional dibawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Jurnal Unila. Vol. 4 No.2. Edisi 2017.
- Ayu, Isdiyana Kusuma. Kepastian Hukum Penguasaan Tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Batu. Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 3 No. 3. Edisi 2019.
- Bur, Arifin dan Desi Apriani. Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian yang Kuat dalam Hubungannya dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah. Jurnal UIR Law Review. Vol. 1 No. 2. Edisi 2017.
- Dewi, IGA Gangga Santi. Pendaftaran Tanah Komunal Masyarakat Hukum Adat Tengger Desa Ngadas Kabupaten Probolinggo. Prosiding Seminar Nasional. Edisi 2019.
- Dewi, Ria Sintha. Tinjauan Yuridis terhadap Pendaftaran Hak Atas Tanah Melalui Proyek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan. Jurnal Rectum. Vol. 1 No. 1. Edisi 2019.
- Gunarto, Marcus Priyo. Asas Kesimbangan dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kita Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 24 No. 1. Edisi 2012.
- Harashta, Afifah, Zaili Rusli, dan Febri Yuliani. Evaluasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2021 Menggunakan Metode CIPP (Context, Input, Process, Product). Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol. 6 No. 2. Edisi 2022.
- Hulu, Klaudius Iljam. Kekuatan Alat Bukti Sertifikat Hak Milik Atas Tanah dalam Bukti Kepemilikan Hak. Jurnal Panah Keadilan. Vol.1 No. 1. Edisi 2021.

- Islamiyati. Analisis Hukum Administrasi Terhadap Kebijakan Pemerintah Mengenai Pembebasan Biaya Sertifikat Tanah Wakaf. Administrative Law and Governance Journal. Vol. 2 No. 1. Edisi 2019.
- Kusmana, Lalu Dhedi. Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penerbitan Izin di Kabupaten Lombok Timur. Jurnal IUS. Vol. 1 No. 3. Edisi 2013.
- Lambonan, Martin Luther. Pendaftaran Tanah dalam Sistem Hukum Indonesia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Jurnal Lex Ex Societatis. Vol. 6 No. 8. Edisi 2018.
- Lestario, Arie dan Erlina. Sistem Pendaftaran Tanah yang memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak atas Tanah di Indonesia. Notary Law Journal. Vol. 1 No. 1. Edisi 2022.
- Muhammad, Naufal, Rio Armanda, dan Reko Dwi Salfutra. Kepastian Hukum bagi Para Pihak Pemegang Surat Tanda Bukti atas Tanah berupa Sertipikat Hak Milik di Tinjau dari Hukum Agraria. Jurnal Hukum Progresif. Vol. 12 No. 1. Edisi 2018.
- Permadi, Iwan. Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Tanah Bersertipikat Ganda dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum. Jurnal Yustisia. Vol. 5 No. 2. Edisi 2016.
- Pio, Elim Riedel Christmas. Tanggung Jawab Administrasi Aparatur Sipil Negara terhadap Perbuatan Melawa Hukum dalam Menjalankan Kewenangannya. Jurnal Lex Administrarum. Vol. 6 No. 4. Edisi 2018.

Ramadhani, Rachmat. Pendaftaran Tanah sebagai Langkah untuk Mendapatkan Kepastian Hukum terhadap Hak Atas Tanah. Jurnal Sosial dan Ekonomi. Vol. 2 No. 1. Edisi 2021.

Safitri, Fina Ayu, Lita Tyesta ALW dan Anggita Doramia Lumbanraja. Akibat Hukum Penggunaan Sistem Publikasi Negatif Berunsur Positif dalam Pendaftaran tanah di Kota Semarang. Jurnal Notarius. Vol. 13 No. 2. Edisi 2020.

Sari, Indah. Hak-Hak atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Jurnal Mitra Manajemen. Vol. 9 No. 1. Edisi 2017.

Tanri, Arif, Bambang Eko Turisno dan Adya Paramitha Prabandari. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Jurnal Notarius. Vol. 13 No. 2. Edisi 2020.

Wibowo, Agus dan Siti Mariyam. Kontekstualisasi Hukum Agraria di Bidang Pertanahan Setelah Otonomi Daerah di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 3 No. 3. Edisi 2021.

C. SKRISI/ DISERTASI

Maelani, Alif. Konsep Pola Asuh Munif Chatib dalam Buku yang Berjudul Orang Tuanya Manusia. (Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015).

Marbun, SF. Pembentukan, Pemberlakuan, dan Peranan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Menjelmakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Indonesia. (Disertasi, Bandung: Universitas Padjajaran, 2001).

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan
Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)

Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 1/Juknis-
100.HK.02.01/I/2022.

E. LAIN-LAINNYA

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 27/G/TF/2021/PTUN.SMD.